

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR NEGERI SERANG PENGASIH KULON PROGO

IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN SEKOLAH DASAR NEGERI SERANG PENGASIH KULON PROGO

Oleh: niga anggarani pratiwi, pendidikan luar biasa, fakultas ilmu pengetahuan, universitas negeri yogyakarta, niga.anggaani@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) budaya inklusi yang tercipta di SD Negeri Serang, (2) kebijakan yang telah diterapkan di SD Negeri Serang, (3) implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Serang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian meliputi guru kelas, kepala sekolah dan teman kelas anak berkebutuhan Kkhusus di SD Negeri Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman dengan langkah-langkah kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi pendidikan inklusif pada dimensi budaya memperlihatkan adanya (a) penolakan terhadap ABK (b) kurang optimal kolaborasi antara pendidik dengan orangtua/wali, (c) belum ada tenaga ahli seperti Guru Pendamping Khusus (GPK), (d) layanan jam tambahan dan pemberian sanksi, serta (e) sosialisasi terkait pendidikan inklusif ke seluruh warga sekolah. (2) Implementasi pendidikan inklusif dalam dimensi kebijakan (a) fasilitas aksesibel, (b) penekanan eksklusi dengan menerima semua anak dan pemberian perlakuan yang sama, (c) penekanan ketidakhadiran dengan pengutamaan layanan dan pemberian motivasi. Serta (3) pada dimensi implementasi menunjukkan adanya (a) perbedaan pada perencanaan pengajaran untuk ABK, (b) pembelajaran berupa aktivitas fisik dan berkelompok mendukung partisipasi semua anak, (c) pelaksanaan asesmen belum mandiri, dan (d) pembelajaran belum terpusat pada anak.

Kata kunci: implementasi, pendidikan inklusif

Abstract

This study aims to find out: (1) inclusion culture created in Serang Elementary School, (2) policies that have been implemented in Serang Public Elementary School, (3) implementation of inclusive education in Serang Elementary School. The type of research used is descriptive qualitative research. The research subjects included class teachers, principals and classmates of children with special needs in SD Negeri Serang. The method used in this study is a case study method. Data collection uses observation and interview techniques. The data obtained are then analyzed with interactive models from Miles and Huberman with data condensation steps, presenting data (data display), and drawing conclusions or verification (conclusion drawing and verification). The validity of the data is tested using source and technique triangulation. The results showed that (1) the implementation of inclusive education in the cultural dimension shows (a) the rejection of ABK (b) less optimal collaboration between educators and parents / guardians, (c) there are no experts such as Special Facilitators (GPK), (d) additional hour services and sanctions, and (e) socialization of inclusive education to all school members. (2) Implementation of inclusive education in the policy dimension (a) accessible facilities, (b) emphasis on exclusion by accepting all children and giving equal treatment, (c) suppressing absenteeism by prioritizing services and giving motivation. And (3) on the implementation dimension there are (a) differences in teaching planning for ABK, (b) learning in the form of physical activity and groups supporting the participation of all children, (c) the implementation of assessments is not independent, and (d) learning is not child-centered .

Keywords: implementation, inclusive educatio

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa (Aniska, 2016). Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Indonesia, 2003). Kata 'Setiap warga negara' berarti meliputi setiap warga tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Kata penyandang disabilitas yang dimaksud yakni setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas memiliki tujuh belas hak, termasuk hak atas pendidikan (Indonesia, 2016). Melalui beberapa regulasi tersebut, pemerintah berupaya menjamin penyediaan pendidikan yang bermutu termasuk bagi penyandang disabilitas. Dalam bidang pendidikan, penyandang disabilitas kemudian disebut dengan istilah anak berkebutuhan khusus.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dalam program wajib belajar dua belas tahun (P. R. Indonesia, 2016). Saat ini, sekolah regular banyak yang menerima anak berkebutuhan khusus. Sekolah regular yang menerima anak berkebutuhan khusus disebut sebagai sekolah inklusif. Keberadaan sekolah inklusif menyebabkan sekolah luar biasa (SLB) tidak lagi selalu menjadi sekolah yang ditujukan bagi anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun anak tidak berkebutuhan khusus agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak serta berkualitas untuk masa depan kehidupannya (Darma & Rusyidi, 2003). Pendidikan inklusif telah disepakati oleh banyak negara untuk diimplementasikan dalam rangka mengurangi perilaku diskriminatif dalam bidang pendidikan. Beberapa dokumen internasional, seperti Deklarasi HAM tahun 1948, Konferensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, Pernyataan Salamanca, telah dihasilkan sebagai wujud komitmen banyak negara untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif. Implementasi pendidikan inklusif diperlukan agar anak berkebutuhan khusus tetap dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan memperoleh pendidikan yang layak.

Pihak sekolah dapat menggunakan instrumen *Index for Inclusion* untuk mengembangkan sekolah inklusif. Inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berprinsip untuk mengembangkan pendidikan, kebijakan, dan praktik yang dapat mempengaruhi semua orang. *Index for Inclusion* memiliki tiga dimensi, meliputi: membentuk atau menciptakan budaya inklusif, menghasilkan kebijakan terkait inklusif, dan mengaplikasikan inklusif dalam praktik (Booth & Ainscow, 2012). Pada tiap dimensi memiliki aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai langkah-langkah pengembangan pendidikan inklusif.

Pada dimensi budaya, seluruh warga sekolah harus saling menerima dan berkolaborasi agar dapat membentuk dan/atau menciptakan budaya inklusif. Budaya inklusif memiliki dua aspek. Aspek pertama yakni membangun masyarakat secara aktif untuk saling membantu dan

mendukung. Pada dimensi kebijakan, dukungan kebijakan diperlukan untuk mewujudkan pendidikan inklusif di sekolah. Dimensi kebijakan memiliki dua aspek. Aspek pertama yakni mengembangkan sekolah untuk semua, sekolah yang mampu menyediakan fasilitas yang aksesibel terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan mampu menerima keberagaman tanpa memandang ras serta warna kulit. Pada dimensi implementasi, mewujudkan praktik pengaplikasian inklusif di sekolah. Dimensi implementasi memiliki dua aspek. Aspek pertama yakni belajar bersama dalam perbedaan. Setiap pendidik dan/atau kependidikan harus dapat memenuhi kebutuhan anak didik agar dapat membantu optimalisasi kemampuan yang dimiliki anak didik. Aspek kedua yakni pengerahan sumber daya. Aspek ini fokus terhadap pemberian apresiasi terhadap anak berkebutuhan khusus agar dapat diterima di lingkungan sekolah (Booth & Ainscow, 2012).

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia masih mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi berdasarkan dimensi pada *Index for Inclusion* sebagai berikut. Kendala pada dimensi budaya yakni masih terdapat penolakan terhadap kehadiran dan belajar bersama dengan anak berkebutuhan khusus (Ni'matuzahroh, 2015). Permasalahan lainnya terkait peran *stakeholder* di bidang pendidikan ialah terbatasnya pelatihan terkait pendidikan inklusif dan rendahnya peran orangtua dan masyarakat (Tarnoto, 2016). Kendala pada dimensi kebijakan yakni keterbatasan pengetahuan pembuat kebijakan terhadap pendidikan inklusif dan pembangunan sarana prasarana yang aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus masih terbatas di sekolah (Ni'matuzahroh, 2015). Meskipun regulasi telah tegas mengatur pemerataan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengakses pendidikan, kasus diskriminasi dalam bidang pendidikan masih kerap terjadi khususnya terhadap anak

berkebutuhan khusus (Prasetya, Rahman & Adityawati, 2018). Kendala pada dimensi implementasi yakni pemahaman terkait kurikulum yang berdeferensiasi dan masih minimnya pengetahuan pendidik dalam memperlakukan anak berkebutuhan khusus (Ni'matuzahroh, 2015).

Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan yang mendukung terjadinya interaksi antara anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya yang bersekolah di sekolah regular sehingga mampu meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan motivasi dalam hal belajar (Smith, 2006). Nyatanya, masih terdapat kasus-kasus yang merugikan anak berkebutuhan khusus pada praktik penerapan pendidikan inklusif di Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan masih banyak tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Anak berkebutuhan khusus rentan terhadap perlakuan yang tidak layak, diskriminasi, dan lain sebagainya, dari anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus (Adhyatma & Handayani, 2017).

Faktor utama yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif yakni dukungan dari orang tua, guru, dan anak didik, namun beberapa orang tua, guru, dan anak didik belum menyetujui dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan pendidikan inklusif (Asriningtyas, 2015). Pada kenyataannya, masyarakat masih berpikiran bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus tidak bisa bersekolah di sekolah regular, karena masyarakat menganggap bahwa tempat anak berkebutuhan khusus hanya di Sekolah Luar Biasa (SLB) (Karana, 2016). Hal ini sama dengan masih terdapat sikap diskriminasi sesama manusia. Guru lebih mendukung program inklusif untuk anak berkebutuhan khusus yang telah mampu bersekolah dan mengikuti pelajaran, sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus yang kurang mampu mengikuti pelajaran diperlukan pendamping dalam belajar dan terapis untuk mempermudah guru menangani mereka (Elisa & Wrastari, 2013). Di sisi lain, belum siapnya

pendidikan inklusif di sekolah ini meliputi: belum adanya guru pendamping khusus, belum tersedianya sarana dan prasarana yang mampu menunjang kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan belum adanya kurikulum yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus, serta belum terjalannya kerja sama dengan mitra dalam pengelolaan pendidikan inklusif (Umami, 2016).

Berdasarkan data Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Kulon Progo sejak tahun 2007, Kulon Progo telah menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif. Kebijakan yang mengatur pendidikan inklusif di Kulon Progo diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

Sekolah Dasar Negeri Serang merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif. SD Negeri Serang menjadi sasaran tepat bagi penelitian selain karena SD tersebut merupakan sekolah yang telah inklusif, SD Negeri Serang belum pernah diadakan penelitian terkait pendidikan inklusif. Guru-guru yang mengajar di SD Negeri Serang memiliki latar belakang bukan dari bidang Pendidikan Luar Biasa dan belum adanya GPK di sekolah tersebut. Pandangan guru sangat dibutuhkan dikarenakan guru yang langsung berhadapan dengan kebutuhan anak didik, baik itu yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang pada umumnya. SD Negeri Serang memiliki anak berkebutuhan khusus di kelas yang diamati peneliti.

Berdasarkan penjabaran di atas, untuk dapat mendeskripsikan terkait pendidikan inklusif yang diterapkan di SD Negeri Serang, peneliti mengkhususkan pada budaya, kebijakan, dan praktik pendidikan inklusif. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut di SD Negeri Serang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab penelitian ini di gunakan untuk menggambarkan fakta-fakta atau keadaan terkait implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Serang. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus.

Setting Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di SD Negeri Serang yang terletak di Serang, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo. Waktu penelitian dilakukan bulan Oktober 2018– November 2018.

Subjek Penelitian

Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru kelas, dan teman sebangku/teman kelas dari anak berkebutuhan khusus yang ada di SD Negeri Serang.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan data ialah dengan observasi dan wawancara semi terstruktur.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana dalam (Rohman & Safitri, 2017) yaitu: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming).

1. Kondensasi Data

Tahapan yang dilakukan peneliti adalah melakukan kondensasi data. Pada tahap ini, peneliti memilah data penting yang telah terkumpul dari lapangan. Data tersebut dipilah atau diringkas untuk mendapatkan informasi yang penting sesuai tujuan dari penelitian. Data tersebut dapat

mempermudah peneliti dalam pengambilan langkah selanjutnya. Peneliti memilah-milah informasi yang penting dari berbagai data yang telah dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara. Data dipilih sesuai dengan kisi-kisi yang dibutuhkan dan merujuk pada tujuan penelitian tersebut.

2. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, data disajikan dalam bentuk naratif sesuai dengan data yang diperoleh peneliti. Sekumpulan data atau informasi yang disajikan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sehingga dengan penyajian data secara rinci atau detail mengurangi kesalahan pemaknaan dan lebih mempermudah peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan. penyajian data hasil penelitian ditulis dari umum ke khusus (infuktif). hal ini dapat mempermudah pembaca dalam memfokuskan pada hasil permasalahan dan membentuk struktur berpikir yang runtut.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini harus dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun sejak awal. Temuan-temuan yang terdapat di lapangan bisa berupa deskripsi atau gambaran dalam bentuk hubungan interaktif, hipotesis, atau teori. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dikaitkan dengan teori yang telah dijabarkan pada kajian teori.

Kesimpulan yang akan ditemukan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya. Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan cara induktif, yang mana peneliti akan menyajikan berbagai permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung bukti-bukti dan contoh fakta yang telah ditemukan saat dilapangan lalu diakhiri dengan pernyataan umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan inklusif telah di terapkan di SD Negeri Serang Pengasih Kulon Progo, dengan demikian peneliti dapat meneliti terkait implementasi pendidikan inklusif yang diterapkan tersebut dengan menggunakan *index for inclusion*.

1. Dimensi Budaya

Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan bahwa Penerapan pendidikan inklusif justru belum semuanya sesuai dengan indeks inklusi (Praptiningrum, 2010). terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Serang terutama pada tema penerimaan. Anak berkebutuhan khusus yang terdaftar di sekolah tersebut mendapatkan perlakuan diskriminasi. Perlakuan diskriminasi ini muncul dari teman kelas anak berkebutuhan khusus tersebut. Bentuk perlakuan diskriminasi yang diterima oleh anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Serang berupa ejekan dan dikucilkan atau didiamkan (Yatim & Yanti, 2017).

Perlakuan diskriminasi di sekolah inklusif yang terdapat di Indonesia masih dianggap hal wajar (Triyanto & Permatasari, 2017). Perkembangan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus baik di Indonesia ataupun di luar negeri, memiliki pola yang hampir sama yaitu diabaikan, dikasihani, diberikan layanan atau perhatian yang memadai, tingkat perhatiannya pun sangat berbeda dan tindakan yang dilakukan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di luar negeri jauh lebih maju dan sudah lebih memanusiakan mereka (Hermanto, 2011).

Melihat keadaan yang demikian, para pendidik di sekolah tersebut melakukan beberapa tindakan, salah satunya berkolaborasi (Wijayanti, 2016). Kolaborasi yang dilakukan SD Negeri Serang, Pengasih yaitu dengan melibatkan para pendidik dan orangtua/wali. Terlibatnya orang terdekat dari anak tersebut dalam mengembangkan sikap

positif baik terhadap pelajaran maupun lainnya, akan memudahkan anak tersebut dalam menangkap sesuatu yang diajarkan (Retnaningtya & Paramitha, 2015). Sehingga kolaborasi ini sangat penting dilakukan di sekolah yang telah menerapkan pendidikan inklusif.

Adanya kolaborasi tersebut, ternyata belum mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus (Persada & Efendi, 2018). Hal ini juga dikarenakan kurang maksimalnya kolaborasi antar sekolah dengan orangtua/wali untuk selalu mendampingi anak dalam pelajaran selama anak berada di rumah. Kenyataan yang ditemukan di lapangan ialah anak berkebutuhan khusus selalu lupa untuk mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, perhatian orangtua/wali sangat diperlukan agar anak lebih merasa dihargai keberadaannya (Tarnoto, 2016). Selain kolaborasi dengan orangtua/wali, pihak sekolah hendaknya melakukan kolaborasi dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Sebab, dengan adanya GPK akan memudahkan guru kelas dalam menjelaskan materi ke anak berkebutuhan khusus (Falatansya, 2018), namun kenyataannya, di SD Negeri Serang Pengasih belum ada GPK sehingga penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut masih sangat kurang.

Melihat keadaan yang demikian, pihak sekolah tidak tinggal diam. Pihak sekolah melakukan beberapa tindakan berupa pemberian nasihat kepada teman kelas ABK dan pemantauan (Loreman, 2007). Hal ini dilakukan agar terwujudnya sikap-sikap positif seperti: saling menghormati dan saling membantu terhadap sesama. Sikap tersebut ini tidak hanya ditujukan terhadap teman sebaya saja, namun terhadap tenaga pendidik/kependidikan lainnya juga. Pendidikan di sekolah belum mampu membentuk secara keseluruhan pribadi lulusan yang dapat menggambarkan karakter dan budaya bangsa, hal ini disebabkan akibat pendidikan yang masih

menitikberatkan dan memfokuskan pada capaian belajar anak secara kognitif (Suyitno, 2012). Hal ini sesuai, karena berdasar pada temuan di lapangan yang telah dijabarkan di atas, memang menuntut semua anak didik untuk memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan sekolah.

2. Dimensi Kebijakan

Sikap eksklusif dan tindak penolakan seperti yang telah dijelaskan pada dimensi budaya, sangat merugikan bagi anak yang membutuhkan pendidikan khusus (Rudiyati, 2011). Penanganan sekolah terhadap permasalahan tersebut ialah dengan menambahkan jam belajar anak yang memiliki kebutuhan khusus. Pembahasan jam ini berfungsi sebagai pendukung potensi anak (Yuliawan, 2017). agar anak dapat mengejar ketertinggalan dan mendapatkan pemahaman terkait pembelajaran yang telah diajarkan sebelumnya.

Temuan lainnya di dimensi kebijakan ialah hasil sosialisasi terkait pendidikan inklusif menjadi salah satu sumber untuk dibagikan ke pendidik di sekolah, termasuk kepala sekolah dan orangtua/wali (Mareza, 2016). Berdasarkan hal tersebut, ditemukan bahwa penerapan pendidikan inklusif di SD Negeri Serang belum sepenuhnya membuat anak tidak merasa terbebani. Hal ini dikarenakan pada poin membangun interaksi yang kurang terlaksana dengan baik (Darma & Rusyidi, 2003). Interaksi yang dilakukan anak baik dengan teman kelas maupun dengan guru kelas masih mengalami kesulitan, oleh karena itu perlunya program tambahan dari sekolah guna meningkatkan rasa percaya diri anak dan kemampuan berinteraksi seperti pergantian tempat duduk dan pembelajaran yang berkelompok. Sebab, hal ini akan menuntut anak untuk mengeluarkan gagasan atau pikirannya terkait hal yang sedang dibahas dan dapat mengurangi tingkat *bullying*.

3. Dimensi Implementasi

- a. Kurangnya Tenaga Ahli: Guru Pendamping Khusus

GPK atau Guru Pendamping Khusus ini merupakan hal pokok dalam penerapan pendidikan inklusif dikarenakan tugas seorang GPK yang sangat penting (Rahmaniar, 2016). SD Negeri Serang Pengasih dalam impelentasi pendidikan inklusif ditemukan beberapa masalah klasik yaitu kurangnya tenaga guru pembimbing khusus (GPK), tidak tersedianya ruang khusus untuk penanganan anak berkebutuhan khusus, tidak ada tenaga psikologi/bimbingan dan konseling, kurangnya sosialisasi tentang pendidikan inklusif di masyarakat sekitar sekolah, dan kurangnya pengetahuan guru regular tentang anak berkebutuhan khusus (Sudarto, 2017). Hal ini menyebabkan kurang optimalnya penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut.

b. Belum Bisa Melaksanakan Asesmen secara Mandiri

Sekolah belum mampu untuk melaksanakan kebijakan asesmen secara mandiri dikarenakan guru di SD Negeri Serang Pengasih yang terdaftar di sekolah tersebut, belum semua guru memiliki kemampuan pendidikan inklusif (Prastiyono, 2014). Sekolah melaksanakan asesmen dengan melakukan kerjasama dengan SLB Negeri 1 Kulon Progo yang jaraknya lumayan jauh dari lokasi SD Negeri Serang Pengasih. Setelah asesmen selesai dilakukan, hasil asesmen akan ditindaklanjuti dengan pelayanan khusus salah satunya berupa penambahan jam belajar ABK (Yuliawan, 2017). Hasil dari penambahan jam belajar tersebut masih sangat kurang untuk mengembangkan potensi ABK. Hal ini disebabkan tidak ada dukungan dari orangtua/wali secara optimal (Tarnoto, 2016). Tidak adanya pengulangan materi pembelajaran di rumah dan ditambah kesibukan berjualan orangtua membuat anak semakin menurun.

c. Pembelajaran Belum Terpusat pada Anak

Dimensi yang terakhir ialah dimensi implementasi (praktik) inklusif. Pada dimensi ini mengembangkan praktik-

praktik sekolah dimana merefleksikan budaya inklusif dan peraturan-peraturan sekolah.

Berdasarkan temuan di lapangan, pembelajaran belum berpusat pada anak. adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang (Andrianti, 2014).

Proses pembelajaran berpusat pada anak dapat membantu guru dalam perencanaan pembelajaran (Suwarjo, Maryatun, & Kusumadewi, 2012).

Berdasarkan temuan pembelajaran dibuat secara responsif terhadap perbedaan tiap-tiap anak (Sunanto & Hidayat, 2016). Hal ini bertujuan untuk meyakinkan kepada anak didik baik yang memiliki hambatan ataupun tidak, bahwa pendidikan hendaknya adil dan tidak diskriminatif, serta peka terhadap semua budaya dan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Tenaga pendidik/kependidikan, dan semua anak sebagai masyarakat sekolah menghargai berbagai perbedaan. Guru kelas tidak jarang memberikan sentuhan yang berbeda saat pelajaran, salah satunya seperti pembentukan kelompok. Komponen pembelajaran yaitu terdiri dari kurikulum, proses pembelajaran, dan evaluasi (Supena, 2005). Sesuai dengan hal tersebut, SD Negeri Serang juga menggunakan pembelajaran yang sama. Muali dari kurikulum yang digunakan ialah Kurikulum 13, sedang proses pembelajaran menggunakan bahan ajar yang sama, dan evaluasi pembelajaran menggunakan pengayaan dan remedial.

Adapun konsep utama pengarahannya sumber daya dalam praktik sekolah inklusif yang dimuat dalam deklarasi Salamanca meliputi: anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya (Abdullah & Aman, 2016). Keragaman tidak menjadi masalah (Alimin, 2013), sekolah perlu mengakomodasi semua anak, anak berkebutuhan khusus

seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, partisipasi masyarakat itu sangat penting bagi inklusif, pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusif, kurikulum yang fleksibel, dana inklusif membutuhkan sumber-sumber, dan dukungan yang tepat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan penelitian mengenai implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Serang sebagai berikut: berdasarkan *index for inclusion*, terdapat tiga dimensi yang saling berkaitan, meliputi: dimensi budaya, kebijakan, dan praktik.

1. Dimensi Budaya

Dimensi budaya di SD Negeri Serang yang berkaitan dengan tema penerimaan ditemukan adanya penolakan terhadap ABK oleh teman kelas. 'Kebutuhan' ABK belum bisa ditolelir menjadi faktor utama bagi teman kelas ABK untuk melakukan penolakan tersebut. Hal ini berdampak pada sikap antar teman yang kurang menghargai dan menghormati. Ditambah dengan kurang maksimalnya kolaborasi yang dibangun antara pendidik dan orangtua/wali serta belum adanya GPK di SD Negeri Serang Pengasih. Pihak sekolah telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada seluruh anak didik dan telah mencoba menerapkan dengan table peraturan yang dapat menunjang kedisiplinan anak. Pihak sekolah juga telah melakukan sosialisasi terkait pendidikan inklusif ke seluruh warga sekolah.

2. Dimensi Kebijakan

Dimensi kebijakan inklusif terdiri atas beberapa aspek yang meliputi mengembangkan sekolah untuk semua dan pengorganisasian dukungan untuk keragaman. Penelitian ini menunjukkan adanya fasilitas yang telah aksesibel terhadap kebutuhan ABK sehingga anak dapat secara mandiri dalam mengakses

segala fasilitas yang tersedia di SD Negeri Serang. Fasilitas yang tersedia meliputi: perpustakaan, papan tulis, dan lain sebagainya. ABK yang berada di SD Negeri Serang tidak ada yang bermasalah dalam hal fisik, sehingga fasilitas yang terdapat di sekolah tersebut dapat dengan mudah untuk diakses oleh semua anak, termasuk ABK.

Kebijakan yang telah diterapkan telah mampu menekan eksklusifitas ABK di pandangan masyarakat umum. Sekolah menerima ABK secara terbuka dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak didik pada umumnya. Pengembangan sekolah diawali dengan perlakuan dari pihak sekolah terhadap anak dan tenaga pendidik/kependidikan. Sebab, perlakuan pihak sekolah akan mempengaruhi pengorganisasian dukungan untuk diterimanya sebuah keragaman. Seperti yang telah dijelaskan diatas, semua diterima. Sekolah juga menerapkan kebijakan berupa mengutamakan layanan dan pemberian motivasi guna menekan ketidakhadiran. Sekolah memperkecil diskriminasi terhadap ABK dengan pemberian nasihat kepada teman kelas.

3. Dimensi Implementasi

Dimensi implementasi menunjukkan adanya perbedaan waktu perencanaan pengajaran untuk ABK dengan anak pada umumnya. ABK mendapatkan waktu lebih panjang dari pada anak lainnya. Hal ini disebabkan ABK mendapatkan layanan khusus berupa tambahan jam dan pengulangan materi yang dilakukan sepulang sekolah. Pembelajaran yang dapat mendukung partisipasi semua anak berupa aktivitas fisik dan berkelompok, dengan demikian anak dapat bersosialisasi dengan teman kelas. Pelaksanaan asesmen belum bisa ditangani secara mandiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya tenaga ahli seperti GPK. Pembelajaran belum terpusat pada anak.

Saran

1. Bagi Pembuat Kebijakan

- a. Penempatan guru pendamping khusus di SD Negeri Serang
- b. Memberikan pelatihan terhadap tenaga pendidik/ kependidikan terkait pendidikan inklusif.

2. Bagi Pendidik dan Pihak Sekolah

- a. Sekolah memberikan buku penghubung kepada siswa agar orangtua/wali mengetahui kegiatan yang dilakukan anak selama berada di sekolah.
- b. Memberikan program layanan yang mendukung sosial anak dan memaksimalkan potensi ABK

3. Bagi Orangtua/Wali dari Anak Didik

- a. Orangtua/ wali sebaiknya aktif bertanya secara kontinyu terkait kegiatan yang dilakukan anak selama di sekolah, hal ini bertujuan agar anak dapat mengingat kembali hal-hal atau kegiatan yang telah dilakukan selama berada di sekolah untuk perkembangan yang lebih optimal.
- b. Orangtua/wali sebaiknya menerapkan jam belajar di rumah, hal ini berguna untuk membiasakan anak melakukan pengecekan kembali terkait tugas dan mengulang materi yang telah disampaikan.
- c. Orangtua/wali menghadiri setiap pertemuan wali serta mengusulkan program yang mendukung pembelajaran anak didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., & Aman. (2016). Model Pendidikan Inklusif dalam Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 4 Palu. *ISTORIA Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 12(1).
- Adhyatma, M. D. R., & Handayani, M. M. (2016). Pengaruh Penerapan Positive Behaviour Support terhadap Pengembangan Budaya Inklusi. *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v1i12016.22-34>
- Alimin, Z. (2013). Paradigma Pendidikan Inklusif sebagai Upaya Memperluas Akses dan Perbaikan Mutu Pendidikan. *JASSI_Anakku*, 12, 171–180.
- Andrianti, S. (2014). Pendekatan Pembelajaran Berpusat Pada Siswa Dalam Pendidikan Agama Kristen Sebagai Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Antusias*, 3(5), 86–102.
- Aniska, T. D. (2016). *Layanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo*. (1), 1.
- Asriningtyas, R. (2015). *Sikap Guru terhadap Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Inklusif Se- Kabupaten Purbalingga*.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2012). *Index for inclusion developing learning and participation in schools editing and production for CSIE Mark Vaughan CSIE supporting inclusion challenging exclusion*. (2002). Retrieved from <http://csie.org.uk/resources/translations/IndexEnglish.pdf>
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2003). Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia [The implementation of inclusive schools in Indonesia]. *Prosiding KS:Riset & PKM*, 2(2), 147–300.
- Elisa, S., & Wrastari, A. T. (2013). Sikap guru terhadap pendidikan inklusi ditinjau dari faktor pembentuk sikap [Teachers' attitudes toward inclusive education viewed from the forming factors of attitude]. *Jurnal Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan*, 2(01), 1–10.
- Falatansya, F. (2018). *Peran Guru Pendamping Khusus Dalam*

- Mengatasi Perilaku Hiperaktif Siswa Kelas III MI Muhammadiyah PK Kartasura*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hermanto. (2011). *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menumbuhkan Kesadaran Perbedaan Individu Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif*. 1–11.
- Indonesia, P. R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. , Pub. L. No. Nomor 20 (2003).
- Indonesia, P. R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. , Pub. L. No. Nomor 8 (2016).
- Karana, D. putera. (2016). Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif di SD Negeri Gadingan Wates dan Mi Ma'arif Pagerharjo Samigaluh. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 63–76.
- Loreman, T. (2007). Seven Pillars Of Support For Inclusive Education. *INTERNATIONAL JOURNAL OF WHOLE SCHOOLING*, 3(2).
- Mareza, L. (2016). Pengajaran Kreativitas Anak Berkebutuhan Khusus pada Pendidikan Inklusif. *Jurnal Indigenous*, 1(2), 99–105.
- Ni'matuzahroh. (2015). Analisis kesiapan guru dalam pengelolaan kelas inklusi [Analysis of teacher readiness in inclusive class management]. *Seminar Psikologi & Kemanusiaan*, 978–979.
- Persada, H. J., & Efendi, M. (2018). *Studi Kasus Implementasi Layanan Pendidikan Inklusif di Kota Madiun*. 4, 7–11.
- Praptiningrum, N. (2010). *Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*.
- Prasetya, H., Rahman, M., & Adityawati, I. A. (2018). *Layanan Pembelajaran untuk Anak Inklusi (Memahami Karakteristik dan Mendesain Pelayanan pembelajaran dengan baik)* (E. F. Rusydiyah, Ed.). Dwiputra Pustaka Jaya.
- Prastiyono. (2014). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di sekolah Galuh Handayani Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 1–21.
- Rahmaniar, F. A. (2016). Tugas Guru Pendamping Khusus (GPK) Dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif SD Negeri Giwangan Yogyakarta. *Jurnal Widia Ortodidaktika*, 5(1), 1252–1263.
- Retnaningtya, M. S., & Paramitha, P. P. (2015). Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di tk anak ceria. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 4(1), 9–17.
- Rudiyati, S. (2011). Potret Sekolah Inklusif di Indonesia. *Memilih Sekolah Yang Tepat Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, 1–25. <https://doi.org/10.1027//1016-9040.6.2.123>
- Smith, J. D. (2006). *Inklusi: Sekolah Ramah untuk Semua* (1st ed.). Bandung: Nuansa.
- Sudarto, Z. (2017). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 1(1), 97. <https://doi.org/10.26740/jp.v1n1.p97-106>
- Sunanto, J., & Hidayat. (2016). Desain Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kelas Inklusif. *JASSI_Anakku*, 17(1), 47–55.

- Supena, A. (2005). Model Pendidikan Inklusif. *Parameter*, 29(2).
<https://doi.org/doi.org/10.21009/parameter.292.03>
- Suwarjo, Maryatun, I. B., & Kusumadewi, N. (2012). Penerapan Student Centered Approach pada Pembelajaran Taman Kanak-Kanak Kelompok B (Studi Kasus di Sekolah Laboratorium Rumah Citta). *Jurnal Pendidikan Anak*, 1.
- Suyitno, I. (2012). Pengembangan Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal. *Pendidikan Karakter*, 2(1), 1–13.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. *Humanitas*, 13(1), 50–61.
- Triyanto, T., & Permatasari, D. R. (2017). Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 25(2), 176–186.
<https://doi.org/10.17977/um009v25i22016p176>
- Umami, F. N. (2016). *Permasalahan dalam Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Piyaman III Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*. Yogyakarta.
- Wijayanti, M. M. (2016). *The Description Of Teachers' Stressor And Manifestation Of Special Needs Teachers In Inclusive And Special Schools In Jakarta*.
- Yatim, Y., & Yanti, M. (2017). Bentuk perlakuan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi sd negeri 52 kuranji kecamatan kuranji. *Sosiologi*, 1–11.
Retrieved from
[file:///C:/Users/Dell/Downloads/MhNSeFs9kX0EtHsJ2W9HuedK5ZHYxZavxPSUKqBb \(2\).pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/MhNSeFs9kX0EtHsJ2W9HuedK5ZHYxZavxPSUKqBb%20(2).pdf)
- Yuliawan, E. R. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus Sekolah Inklusi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6.